Katalog: 9302020.3311

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Pengeluaran
Kabupaten Sukoharjo

2018-2022

sukoharjokab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SUKOHARJO

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Pengeluaran
Kabupaten Sukoharjo

2018-2022

https://sukoharjokab.bps.go.id

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKOHARJO 2018-2022

Nomor Publikasi : 33110.2305
Katalog BPS : 9302020.3311

Ukuran Buku : 21,5 cm × 29,7 cm
Jumlah halaman : x + 45 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

Desain Cover:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

Diterbitkan Oleh:
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

https://sukoharjokab.bps.go.id

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKOHARJO 2018-2022

Tim Penyusun

Penanggung jawab : Drs. Ahmad Isbani, MA

Penyunting : Ir. Sri Setyaningsih, M.Si

Penyusun : Resti Amalia, SST

https://sukoharjokab.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Sukoharjo. Penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu: (i) pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha), (ii) pendekatan pengeluaran/ permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran), dan (iii) pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama. Namun Badan Pusat Statistik baru melakukan penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi dan pengeluaran.

Publikasi **PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo 2018-2022** secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* (SNA 2008) seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

https://sukoharjokab.bps.go.id

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Sukoharjo, April 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sukoharjo,

Drs. Ahmad Isbani, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GRAFIK ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1

B. Kegunaan PDRB 2

BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA 3

A. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT) 3

B. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT) 5

C. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP) 7

D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 9

E. Perubahan Inventori 13

F. Ekspor Impor Barang dan Jasa 16

BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SUKOHARJO 2018-2022 19

A. Tinjauan PDRB Sukoharjo 19

B. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 23

C. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT 27

D. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah 27

E. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 29

F. Perkembangan Perubahan Inventori 30

BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018-2022 31

A. PDRB Perkapita 31

B. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB 32

C. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB 32

D. Neraca Perdagangan (*Trade Balance*) 33

E. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) 34

https://sukoharjo.kab.bps.go.id

BAB V PENUTUP 35

LAMPIRAN 37

DAFTAR PUSTAKA 45

https://sukoharjokab.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sukoharjo menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Miliar Rp) 19

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sukoharjo menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Miliar Rp) 20

Tabel 3. Distribusi PDRB ADH Berlaku Kabupaten Sukoharjo menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen) 21

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADH Konstan 2010 Kabupaten Sukoharjo menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen) 22

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Sukoharjo menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen) 23

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2018-2022 24

Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2018-2022 (Persen) 25

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2018-2022 (Persen) 26

Tabel 9. Pertumbuhan Indeks Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2018-2022 (Persen) 26

Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Tahun 2018-2022 27

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2018-2022 28

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Tahun 2018-2022 29

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Tahun 2018-2022 30

Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Tahun 2018-2022 31

Tabel 15. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2018-2022 32

Tabel 16. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Tahun 2018-2022 33

Tabel 17. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Tahun 2018-2022 33

Tabel 18. *Incremental Capital Output Ratio* Tahun 2018-2022 34

https://sukoharjokab.bps.go.id

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 21

Grafik 2. Perbandingan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2018 dan Tahun 2022 22

https://sukoharjokab.bps.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo 2018-2022 (Miliar Rupiah) 39

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo 2018-2022 (Miliar Rupiah) 40

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo 2018-2022 (Persen 41

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo 2018-2022 (Persen) 42

Lampiran 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100) menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo 2018-2022 (Persen) 43

Lampiran 6. Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Tahun 2010=100) Kabupaten Sukoharjo 2018-2022 (Persen) 44

https://sukoharjokab.bps.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu selama setahun, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah tertentu selama setahun.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

https://sukoharjokab.bps.go.id

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang

melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

3. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

https://sukoharjokab.bps.go.id

B. KEGUNAAN PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku, nominalnya menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

A. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

I. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

https://sukoharjokab.bps.go.id

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furnitur, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (o*wner occupied dwellings*);

  Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

https://sukoharjokab.bps.go.id

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

- Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Sedangkan PKRT ADH Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADH Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

I. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

https://sukoharjokab.bps.go.id

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
c. Penyusutan
d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRT adalah:

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).

  Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.

  Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

- Indeks Harga Konsumen (IHK)

  PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut:

  a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

https://sukoharjokab.bps.go.id

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$: Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \ldots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \ldots, 19$

b. Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^{7} \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRT ADH Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRT ADH Berlaku. PKLNPRT ADH Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKLNPRT ADH Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

https://sukoharjokab.bps.go.id

C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

I. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir.

Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.

b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

https://sukoharjokab.bps.go.id

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) Kabupaten Sukoharjo mencakup PK-Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; PK-Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten Sukoharjo; dan PK-Pemerintah Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PKP Kabupaten Sukoharjo adalah:

- Data realisasi APBN untuk instansi vertikal di Sukoharjo (KPPN Surakarta)
- Data realisasi APBD (DPPKAD)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)

- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari KPPN Surakarta, BKD Sukoharjo serta Indeks Harga dari BPS.

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ADH Berlaku

Secara umum, PK-P ADH Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

PK-P ADH Berlaku=

Output non pasar–penjualan barang dan jasa + Output Bank Indonesia

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten, PK-P Kabupaten ADH Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi instansi vertikal di kabupaten tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan yang ada di wilayah kabupaten tersebut.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten ADH Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADH Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

https://sukoharjokab.bps.go.id

D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

I. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian,

sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;

c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

https://sukoharjokab.bps.go.id

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah:

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Data Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga.
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini penyediaan atau "*supply*" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (ADH) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADH berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADH Konstan, maka PMTB ADH Berlaku tersebut di "*deflate*" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

https://sukoharjokab.bps.go.id

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADH Berlaku maupun ADH Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADH Berlaku. Untuk memperoleh nilai ADH Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (ADH Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB ADH Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADH Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADH Berlaku, nilai PMTB ADH Konstan tersebut di "*reflate*" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADH Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB ADH Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua,* untuk memperoleh PMTB ADH Konstan adalah dengan cara men"*deflate*" PMTB ADH Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADH Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADH Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADH Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

https://sukoharjokab.bps.go.id

Untuk perangkat lunak, PMTB ADH Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADH Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADH Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.

b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.

c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

E. PERUBAHAN INVENTORI

I. Konsep, Definisi dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress)*, serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan,

https://sukoharjokab.bps.go.id

pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;

b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;

c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;

d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).

e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;

f. Ternak untuk tujuan dipotong;

g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan

h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait, dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Dirjen Peternakan Kementrian Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

https://sukoharjokab.bps.go.id

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADH Berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- menghitung posisi inventori ADH Konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori ADH Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADH Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori ADH Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADH Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADH Konstan dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori ADH Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

https://sukoharjokab.bps.go.id

F. EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

https://sukoharjokab.bps.go.id

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari daerah tersebut
b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari daerah tersebut

   Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
c. Net Ekspor antar daerah
   - Ekspor antar daerah
   - Impor antar daerah

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah:

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;

- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

https://sukoharjokab.bps.go.id

https://sukoharjokab.bps.go.id

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SUKOHARJO 2018-2022

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Sukoharjo akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2010 sampai dengan 2022, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Sukoharjo digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

https://sukoharjokab.bps.go.id

A. TINJAUAN PDRB SUKOHARJO

Perekonomian Sukoharjo setelah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020, kondisi perekonomian Sukoharjo mulai menunjukkan perbaikan mulai tahun 2021 hingga tahun 2022. Hal ini terlihat dari PDRB tahun 2021 dan 2022 yang terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sukoharjo menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2018-2022 *(Miliar Rp)*

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	23.821,93	25.326,12	25.431,00	26.339,52	29.021,65
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	386,20	438,09	435,38	457,82	523,32
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.947,11	2.063,58	1.971,59	1.974,51	2.027,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.357,94	9.130,17	8.684,87	9.224,99	9.744,97
5. Perubahan Inventori	(514,20)	(279,76)	102,49	116,17	135,27
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	212,26	267,69	265,20	877,46	1.367,60
PDRB	**34.211,25**	**36.945,88**	**36.890,53**	**38.990,46**	**42.819,99**

* *Angka Sementara* ** *Angka Sangat Sementara*

Peningkatan ekonomi selama tahun 2018-2022 tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga (ADH) Berlaku dan atas dasar harga (ADH) Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Nilai PDRB Sukoharjo ADH Berlaku sampai dengan tahun 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun sempat menurun di tahun 2020 akibat terjadinya pandemi yang mempengaruhi segala aspek di seluruh dunia, PDRB Berlaku Kabupaten Sukoharjo kembali meningkat pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga tahun 2022. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume konsumsi.

Tabel 2. PDRB ADH Konstan 2010 Kabupaten Sukoharjo menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2018-2022 *(Miliar Rp)*

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17.389,34	18.185,27	18.081,25	18.439,81	19.509,83
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	254,80	283,29	276,97	284,31	303,30
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.230,17	1.292,64	1.239,64	1.208,49	1.225,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.918,92	6.234,52	5.926,42	6.246,54	6.371,02
5. Perubahan Inventori	(171,83)	(70,76)	53,66	32,88	38,12
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	942,67	1.151,48	1.038,56	1.422,09	1.737,68
PDRB	**25.564,06**	**27.076,44**	**26.616,50**	**27.634,12**	**29.185,36**

* *Angka Sementara* ** *Angka Sangat Sementara*

https://sukoharjokab.bps.go.id

Selain dinilai dari ADH Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai dari ADH Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADH Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADH Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Selama kurun waktu 2018–2022, gambaran tentang perkembangan ekonomi Sukoharjo berdasarkan PDRB ADH Konstan dapat dilihat pada Tabel 2 di atas. Pada tahun 2018, PDRB Konstan Sukoharjo mencapai 25,56 trilyun rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yang mencapai 27,08 trilyun rupiah. Seperti halnya PDRB ADH Berlaku, pada tahun 2020 PDRB ADH Konstan Kabupaten Sukoharjo juga mengalami penurunan menjadi 26,62 trilyun rupiah. Hal ini akibat dampak dari pandemi Covid 19 yang melanda dunia mempengaruhi perekonomian secara menyeluruh. Namun, pada tahun 2021, kondisi pandemi semakin membaik, begitu juga dengan perekonomiannya. Hal ini juga berdampak pada perekonomian Kabupaten Sukoharjo, terlihat dari nilai PDRB ADH Kontan yang kembali meningkat menjadi 27,63 trilyun rupiah pada tahun 2021 dan meningkat lagi menjadi 29,18 trilyun rupiah pada tahun 2022.

Dari grafik berikut, nampak bahwa nilai PDRB ADH Berlaku lebih besar dari nilai PDRB ADH Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADH Berlaku. Dalam PDRB ADH Konstan pengaruh harga telah ditiadakan.

Grafik 1. Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2022 *(trilyun rupiah)*

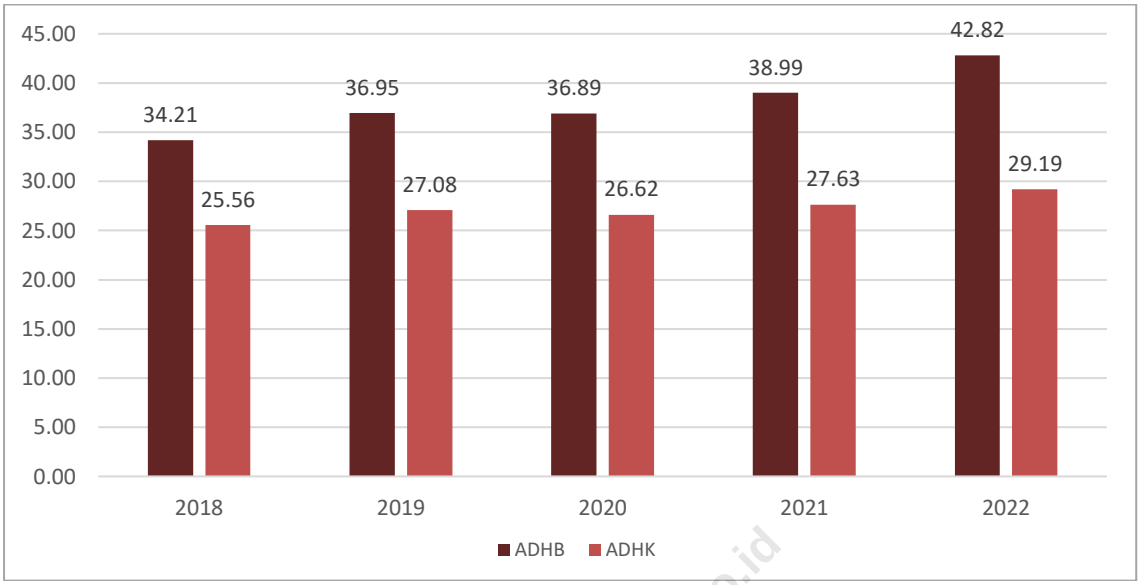

https://sukoharjo.kab.bps.go.id

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor netto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3. Distribusi PDRB ADH Berlaku Kabupaten Sukoharjo
menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2018-2022 *(Persen)*

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	69,63	68,55	68,94	67,55	67,78
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,13	1,19	1,18	1,17	1,22
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,69	5,59	5,34	5,06	4,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	24.43	24,71	23,54	23,67	22,76
5. Perubahan Inventori	(1,50)	(0,76)	0,28	0,30	0,32
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	0,62	0,72	0,72	2,25	3,19
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* *Angka Sementara* ** *Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode 2018 – 2022, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga walaupun persentase dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pengeluaran untuk barang modal (PMTB) memberi kontribusi sekitar 23 - 25 persen, sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 4-6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Perdagangan Sukoharjo yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor antar daerah

dan luar negeri, menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir nilai ekspor Kabupaten Sukoharjo selalu lebih tinggi dari nilai impor. Hal ini terlihat dari nilai net ekspor yang mempunyai nilai positif, yang berarti bahwa perdagangan Sukoharjo menunjukkan posisi "surplus".

Grafik 2. Perbandingan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2018 dan Tahun 2022

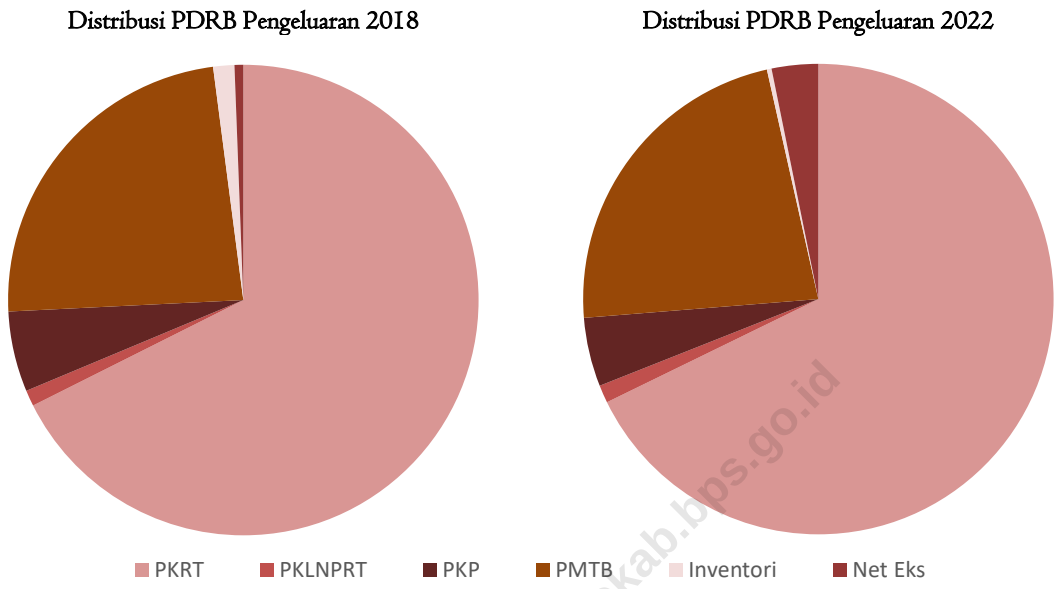

https://sukoharjokab.bps.go.id

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Sukoharjo dari tahun 2018-2022 secara rata-rata mencapai 3,92 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,79 persen (2018); 5,92 persen (2019); -1,70 persen (2020); 3,82 persen (2021); dan 5,61 persen (2022).

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADH Konstan 2010 Kabupaten Sukoharjo menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2018-2022 *(Persen)*

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,30	4,58	(0,57)	1,98	5,80
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,79	11,18	(2,23)	2,65	6,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,77	5,08	(4,10)	(2,51)	1,40
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,74	5,33	(4,94)	5,40	1,99
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	13,25	22,15	(9,81)	36,93	22,19
PDRB	**5,79**	**5,92**	**(1,70)**	**3,82**	**5,61**

* *Angka Sementara* ** *Angka Sangat Sementara*

Sementara itu, indeks implisit (indeks perkembangan harga) PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 5. Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Sukoharjo menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2018-2022 *(Persen)*

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	136,99	139,27	140,65	142,84	148,75
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	151,57	154,64	157,20	161,03	172,54
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	158,28	159,64	159,05	163,39	165,43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	141,21	146,45	146,55	147,68	152,96
5. Perubahan Inventori	299,25	395,36	190,98	353,28	354,84
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	**133,83**	**136,45**	**138,60**	**141,10**	**146,72**

* *Angka Sementara* ** *Angka Sangat Sementara*

https://sukoharjokab.bps.go.id

B. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data pada Tabel 6 menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu 2018-2022 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADH Berlaku) maupun riil (ADH Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai dan volume konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2018-2022 relatif fluktuatif pada kisaran 67-70 persen. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu 69,63 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2021, yaitu 67,55 persen.

Masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya untuk memperkuat daya tahan tubuh supaya tidak terpapar Covid-19. Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2018 konsumsi per kapita sebesar 28,88 juta rupiah, yang artinya pengeluaran rata-rata selama setahun untuk konsumsi dari setiap penduduk Sukoharjo adalah sebesar 25,23 juta rupiah, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahun kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan, dari 30,36 juta rupiah per tahun pada 2019 menjadi 29,36

juta rupiah per tahun pada 2020. Namun di tahun 2021, konsumsi per kapita mengalami peningkatan menjadi 30,31 juta rupiah.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Total Konsumsi RT					
a. ADHB (*Miliar Rp*)	23.821,93	25.326,12	25.431,00	26.339,52	29.021,65
b. ADHK 2010 (*Miliar Rp*)	17.389,34	18.185,27	18.081,25	18.439,81	19.509,83
Proporsi terhadap PDRB (*% ADHB*)	69,63	68,55	68,94	67,55	67,78
PKRT per ruta					
a. ADHB (rupiah)	141.249.715	151.579.683	148.267.888	155.811.630	170.225.233
b. ADHK (rupiah)	105.547.658	111.087.854	106.975.214	110.430.015	116.022.560
PKRT per kapita					
a. ADHB (rupiah)	38.647.822	41.423.234	40.700.283	42.771.314	46.714.734
b. ADHK (rupiah)	28.879.259	30.357.751	29.365.236	30.313.763	31.839.951
Pertumbuhan (*% ADHK*)					
a. Total konsumsi RT	5,30	4,58	(0,57)	1,98	5,80
b. Per-ruta	4,61	5,25	(3,70)	3,23	5,06
c. Perkapita	4,49	5,12	(3,27)	3,23	5,03
Jumlah RT	242.204	243.739	248.810	250.241	251.549
Penduduk Pertengahan Tahun	885.205	891.912	906.395	911.603	916.627

** Angka Sementara* *** Angka Sangat Sementara*

https://sukoharjokab.bps.go.id

Apabila dilihat menurut harga konstan, pertumbuhan konsumsi per kapita berada pada kisaran -3 sampai 5 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,12 persen dan terendah sebesar -3,27 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan konsumsi per kapita setiap tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk Sukoharjo meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai termasuk juga peningkatan kualitas kecuali pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19.

Secara total, konsumsi rumah tangga ADH Konstan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,80 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga cukup berfluktuasi selama 5 tahun terakhir yaitu berturut-turut sebesar 5,30 persen (2018), 4,58 persen (2019), -0,57 persen (2020), 1,98 persen (2021), dan 5,80 persen (2022). Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara "riil" lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 1 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih detail melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
ADHB Tahun 2018 - 2022
(Persen)

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
a. Makanan, Minuman, Rokok	32,20	32,03	33,11	34,04	34,34
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,38	3,44	3,57	3,51	3,37
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan RT	12,65	12,70	12,93	12,69	11,95
d. Kesehatan & Pendidikan	9,37	9,59	9,69	9,81	9,25
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	33,36	32,95	31,80	31,01	32,31
f. Hotel & Restoran	7,19	7,42	6,90	6,95	6,83
g. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1,85	1,85	1,99	1,98	1,95
Total Konsumsi	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* *Angka Sementara* ** *Angka Sangat Sementara*

Tabel 7 memperlihatkan struktur penggunaan konsumsi akhir rumah tangga. Dari tabel tersebut nampak 3 jenis kelompok konsumsi yang peranannya paling besar. Mulai tahun 2020, peranan terbesar bergeser dari kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya menjadi kelompok konsumsi makanan, minuman, dan rokok. Begitu juga tahun 2022, dimana kontribusi konsumsi makanan, minuman dan rokok sebesar 34,34 persen. Kemudian diikuti kontribusi konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya sebesar 32,31 persen; dan kontribusi konsumsi perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga sekitar 11,95 persen.

https://sukoharjokab.bps.go.id

Selama tahun 2018 dan 2019, dari tiga kelompok konsumsi terbesar tersebut, pertumbuhan konsumsi makanan, minuman dan rokok relatif rendah setiap tahun, sangat berbeda dengan pertumbuhan kelompok perumahan dan transportasi yang cukup tinggi di setiap tahunnya. Untuk tahun 2020 ini konsumsi makanan, minuman dan rokok mengalami pertumbuhan 1,60 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan RT yang tumbuh sebesar 1,10 persen, apalagi jika dibandingkan dengan kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya yang mengalami kontraksi 3,42 persen akibat pandemi. Begitu pula dengan pengeluaran untuk kelompok hotel dan restoran yang mengalami kontraksi sebesar 6,84 persen. Namun mulai tahun 2021, pengeluaran untuk transportasi dan hotel kembali meningkat dan terus meningkat hingga tahun 2022 seiring dengan kondisi pandemi yang mulai membaik.

Tabel 8 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 konsumsi kesehatan dan pendidikan paling tinggi pertumbuhannya dibanding pengeluaran konsumsi rumah tangga yang lain. Hal tersebut menunjukkan pada saat ini kebutuhan kesehatan dan pendidikan dirasa penting. Hal ini sebagai akibat dari pengaruh pandemi Covid-19 yang tengah melanda seluruh dunia. Namun, memasuki tahun 2021 saat pandemi mulai membaik, pertumbuhan kelompok kesehatan dan pendidikan melambat walaupun masih bernilai positif dan pada tahun 2022 pertumbuhan kelompok kesehatan dan pendidikan juga mengalami kenaikan sebesar 2,16 persen.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2018-2022

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, Rokok	3,24	3,43	1,60	2,12	5,39
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,42	6,43	0,89	0,41	2,64
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan RT	4,38	3,63	1,00	0,41	1,06
d. Kesehatan & Pendidikan	5,74	5,88	5,36	1,62	2,16
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,85	4,70	(3,42)	3,12	9,73
f. Hotel & Restoran	7,17	7,28	(6,84)	0,49	4,41
g. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	5,01	5,39	0,61	0,53	2,55
Total Konsumsi	**5,30**	**4,58**	**(0,57)**	**1,98**	**5,80**

* *Angka Sementara* ** *Angka Sangat Sementara*

Tingkat perubahan harga penggunaan konsumsi akhir rumah tangga secara implisit disajikan dalam Tabel 9. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rincian peningkatan harga pada kelompok konsumsi akhir rumah tangga sebesar 2,07 persen (2018) ; 1,66 persen (2019) ; 0,99 persen (2020) ; 1,56 persen (2021) ; dan 4,14 persen (2022). Pada tahun 2022, konsumsi Barang Pribadi dan Jasa Perorangan mengalami kenaikan harga paling tinggi, yaitu sebesar 5,49 persen, yang diikuti konsumsi Makanan, Minuman, dan Rokok dengan kenaikan harga sebesar 5,47 persen. Sedangkan konsumsi Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya mengalami kenaikan harga sebesar 4,62 persen untuk tahun 2022.

Tabel 9. Pertumbuhan Indeks Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2018-2022

(Persen)

https://sukoharjokab.bps.go.id

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, Rokok	3,91	2,26	2,16	4,26	5,47
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,39	1,74	3,42	1,45	2,85
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan RT	1,75	2,98	1,24	1,25	2,61
d. Kesehatan & Pendidikan	3,70	2,76	(3,70)	3,16	1,75
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	0,25	0,28	0,33	(2,05)	4,62
f. Hotel & Restoran	2,38	2,34	0,25	3,80	3,76
g. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	2,82	1,76	6,43	2,63	5,49
Total Konsumsi	**2,07**	**1,66**	**0,99**	**1,56**	**4,14**

* *Angka Sementara* ** *Angka Sangat Sementara*

C. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT (LNPRT)

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu hanya sekitar 1 persen saja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah masih dapat ditingkatkan lagi. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk pengeluaran konsumsi LNPRT adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	386,20	438,09	435,38	457,82	523,32
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	254,80	283,29	276,97	284,31	303,30
Proporsi terhadap PDRB *(% ADHB)*	1,13	1,18	1,18	1,17	1,22
Pertumbuhan (% ADHK)	**6,79**	**11,18**	**(2,23)**	**2,65**	**6,68**

** Angka Sementara* *** Angka Sangat Sementara*

https://sukoharjokab.bps.go.id

Dari tabel 10 di atas, dapat dilihat pertumbuhan konsumsi LNPRT dari tahun ke tahun cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,23 persen dampak dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan konsumsi LNPRT selama periode tahun 2018 – 2022 sangat fluktuatif berkisar – 2,65 sampai 11,18 persen dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana konsumsi LNPRT meningkat cukup tinggi sebesar 11,18 persen. Sementara itu, pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 karena masih dalam masa peralihan setelah terjadinya pandemi, sehingga peningkatan konsumsi LNPRT masih berjalan lambat.

D. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Sukoharjo serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah juga terpengaruh pandemi Covid 19 yang ditunjukkan oleh menurunnya konsumsi pemerintah di tahun 2020 dan 2021, dimana pada kurun waktu 2018 dan 2019 sebelumnya angka selalu menunjukan peningkatan, baik untuk ADH Berlaku maupun ADH Konstan 2010. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADH Berlaku sebesar 1,95 triliun rupiah dan meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai 2,06 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2020, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADH Berlaku menurun menjadi 1,97 triliun rupiah dan begitu juga pada tahun 2021 yang sedikit meningkat. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADH

Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada setiap tahunnya sampai tahun 2019, tetapi menurun di tahun 2020 dan 2021.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan, dari 5,69 persen di tahun 2018 menjadi 4,73 persen pada tahun 2022. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2022, sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai 5,69 persen.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Total PKP					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	1.947,11	2.063,58	1.971,59	1.974,51	2.027,18
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	1.230,17	1.292,64	1.239,64	1.208,49	1.225,41
Proporsi terhadap PDRB *(% ADHB)*	5,69	5,59	5,34	5,06	4,73
Rata-rata konsumsi pemerintah perkapita					
a. ADHB *(Rp)*	2.199.619	2.313.653	2.175.204	2.165.971	2.211.560
b. ADHK 2010 *(Rp)*	1.389.705	1.449.294	1.367.664	1.325.679	1.336.870
Pertumbuhan (% ADHK)	**3,77**	**5,08**	**(4,10)**	**(2,51)**	**1,40**

** Angka Sementara* *** Angka Sangat Sementara*

https://sukoharjokab.bps.go.id

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per kapita ADH Berlaku sebesar 2,20 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun berikutnya. Namun mulai tahun 2020 hingga 2021, konsumsi pemerintah per kapita ADH Berlaku mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 konsumsi pemerintah per kapita sebesar 2,17 juta rupiah dan pada tahun 2021 kembali menurun sebesar 2,16 juta rupiah. Setelah 2 tahun mengalami penurunan, konsumsi pemerintah per kapita kembali meningkat di tahun 2022 sebesar 2,21 juta rupiah.

Konsumsi akhir pemerintah secara riil dapat dikatakan mengalami peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata per kapita walaupun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Parameter ini dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 2018-2022, pertumbuhan konsumsi pemerintah perkapita tertinggi terjadi pada tahun 2019, sebesar 5,08 persen, dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -4,10 persen.

E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi fisik. Atau dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Investasi fisik (kapital) berfungsi sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun *riil*. Data tabel 12 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2018-2022 cukup berfluktuasi dari 5,74 persen di tahun 2018, menjadi -4,94 persen di tahun 2020, dan kembali meningkat 5,23 persen di tahun 2021 tetapi kembali menurun menjadi 1,99 persen di tahun 2022. PMTB dalam bentuk bangunan memberikan proporsi lebih besar dibanding non-bangunan dalam pembentukan modal tetap bruto. Pada tahun 2022 perbandingan antara kedua komponen ini adalah 75 persen untuk PMTB bangunan dan 25 persen untuk non-bangunan.

Dari sisi pertumbuhan ADH Konstan, pertumbuhan PMTB bangunan lebih stabil setiap tahunnya akan tetapi pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 3,63 persen. Pertumbuhan PMTB *non*-bangunan sangat fluktuatif, tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,88 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar -9,11 persen.

https://sukoharjokab.bps.go.id

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Total PMTB					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	8.357,94	9.130,17	8.684,87	9.224,99	9.744,97
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	5.918,92	6.234,52	5.926,42	6.236,17	6.246,54
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	24,43	24,71	23,54	23,62	
Struktur PMTB (ADHB)					
Bangunan (%)	73,52	73,03	74,57	75,82	75,41
Non Bangunan (%)	26,48	26,97	25,43	24,18	24,59
Pertumbuhan (ADHK) (%)					
a. Bangunan	5,69	5,32	(3,63)	6,06	1,50
b. Non Banguan	5,88	5,37	(9,11)	3,19	3,70
c. Total PMTB	5,74	5,33	(4,94)	5,40	1,99

* *Angka Sementara* ** *Angka Sangat Sementara*

F. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **"persediaan"** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tanda positif atau negatifnya.

https://sukoharjokab.bps.go.id

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Total Nilai Inventori					
a. ADHB *(Juta Rp)*	(514,20)	(279,76)	102,49	116,17	135,27
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	(171,83)	(70,76)	53,66	32,88	38,12
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	(1,50)	(0,76)	0,28	0,30	0,32

* *Angka Sementara* ** *Angka Sangat Sementara*

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 proporsinya terendah yaitu sebesar -1,50 persen dan tertinggi sebesar 0,32 persen pada tahun 2022.

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018-2022

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

A. PDRB PERKAPITA

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

https://sukoharjokab.bps.go.id

Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
PDRB perkapita *(Rp)*					
- ADHB	38.647.823	41.423.235	40.700.283	42.771.314	46.714.735
- ADHK 2010	28.879.260	30.357.751	29.365.236	30.313.763	31.839.951
Pertumbuhan ADHK perkapita	4,98	5,12	(3,27)	3,23	5,03
Pertumbuhan penduduk	0,78	0,76	1,62	0,57	0,55

* *Angka Sementara* ** *Angka Sangat Sementara*

PDRB perkapita Kabupaten Sukoharjo menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 14), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sukoharjo rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Pada tahun 2022, secara rata-rata penduduk Sukoharjo mampu memproduksi nilai tambah sebesar 46,71 juta rupiah (ADHb) dan 31,84 juta rupiah (ADHk) dengan harga dasar tahun 2010.

Sementara itu, pertumbuhan PDRB per kapita secara "riil" pada tahun 2018 dan 2019 selalu meningkat. Namun, di tahun 2020 PDRB per kapita mengalami penurunan sebesar 3,27 persen. Penurunan PDRB perkapita tersebut diikuti oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat sebesar 1,76 persen pada tahun 2020. Dengan demikian maka penurunan PDRB perkapita tersebut tidak saja terjadi secara

kuantitas tetapi juga terjadi secara kualitas. Namun pada tahun 2021, PDRB per kapita kembali mengalami peningkatan sebesar 3,23 persen dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 5,03 persen, diikuti oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih lambat dari tahun 2020.

B. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Sukoharjo digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 15. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) *(Miliar Rp)*	23.821,93	25.326,12	25.431,00	26.339,51	29.021,65
Total PMTB (ADHB) *(Miliar Rp)*	8.357,94	9.130,17	8.684,87	9.224,99	9.744,97
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2,85	2,77	2,93	2,86	2,98

* *Angka Sementara* ** *Angka Sangat Sementara*

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama lima tahun terakhir sebesar 2,88. Hal ini dapat diartikan penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga 2,88 kali lebih besar dibanding untuk PMTB. Nilai rasio ini selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Kenaikan perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung terjadi pada tahun 2020 dan 2022. Kenaikan tersebut lebih disebabkan pertumbuhan nilai PMTB yang lebih kecil di tahun-tahun tersebut dibanding konsumsi rumah tangga, sedangkan pada tahun 2019 dan 2021, pertumbuhan nilai PMTB lebih besar daripada konsumsi rumah tangga.

C. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Secara rata-rata sekitar 73,73 persen dari produk barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Sukoharjo digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Proporsi ini cenderung menurun dari tahun ke tahun, dari 76,45 persen pada tahun 2018 menjadi 73,73 persen pada tahun 2022, sedangkan

https://sukoharjokab.bps.go.id

produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir, yaitu PMTB dan ekspor memiliki peran yang relatif kecil, sekitar 26,27 persen.

Tabel 16. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) *(Miliar Rp)*					
a. Rumah tangga	23.821,93	25.326,12	25.431,00	26.339,52	29.021,65
b. LNPRT	386,20	438,09	435,38	457,82	523,32
c. Pemerintah	1.947,11	2.063,58	1.971,59	1.974,51	2.027,18
Jumlah	26.155,25	27.827,78	27.837,97	28.771,84	31.572,15
PDRB (ADHB) *(Miliar Rp)*	34.211,25	36.945,88	36.890,53	38.990,46	42.819,99
Proporsi (%)	**76,45**	**75,32**	**75,46**	**73,79**	**73,73**

* *Angka Sementara* ** *Angka Sangat Sementara*

D. NERACA PERDAGANGAN (*TRADE BALANCE*)

Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai **"Ekspor Neto"**, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran uang masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran uang keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

https://sukoharjokab.bps.go.id

Tabel 17. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net ekspor (X – M) ADHB *(Miliar Rp)*	212,26	267,69	265,20	877,46	1.367,60
PDRB ADHB *(Miliar Rp)*	34.211,25	36.945,88	36.890,53	38.990,46	42.819,99
Proporsi (%)	0,62	0,72	0,72	2,25	3,19

* *Angka Sementara* ** *Angka Sangat Sementara*

Selama periode 2018 - 2022, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Sukoharjo dengan luar negeri dan antar kabupaten/provinsi menunjukkan nilai positif dan cenderung semakin meningkat. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran uang masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai "surplus luar wilayah". Pada tahun 2022, neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Sukoharjo menunjukkan nilai tertinggi selama lima tahun terakhir, dengan net eksport sebesar 1.367,60 milyar rupiah.

E. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana:

I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

https://sukoharjokab.bps.go.id

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Data di Tabel 18 menunjukkan besaran ICOR menurun dari sebesar 4,23 (2018) menjadi 4,11 (2022). Pada tahun 2020, ICOR Kabupaten Sukoharjo sebesar -12,90 artinya untuk setiap penurunan nilai tambah PDRB sebesar 1 juta rupiah terjadi penurunan pembentukan modal tetap bruto sebesar 12,90 juta rupiah. ICOR selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, yang berarti semakin efisien dalam penggunaan PMTB untuk meningkatkan nilai tambah PDRB sebesar satu satuan. Semakin rendah nilai ICOR menunjukkan semakin efisien penggunaan kapital untuk dapat meningkatkan nilai tambah PDRB sebesar 1 unit.

Tabel 18. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	25.564,06	27.076,44	26.616,50	27.634,12	29.185,36
Perubahan (Miliar Rp)	1.400,13	1.512,38	(459,94)	1.017,61	1.551,24
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	5.918,92	6.234,52	5.926,42	6.246,54	6.371,02
ICOR	**4,23**	**4,12**	**(12,89)**	**6,14**	**4,11**

* *Angka Sementara* ** *Angka Sangat Sementara*

BAB V

PENUTUP

1. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Nominal PDRB Sukoharjo tahun 2022 ADH Berlaku mencapai 42,82 triliun rupiah. Dari nilai sebesar itu sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah yang mencapai 73,73 persen dimana 67,78 persennya adalah konsumsi rumah tangga. Dengan peranan konsumsi rumah tangga yang sangat dominan, tidak dapat dipungkiri bahwa komponen ini adalah penopang dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sukoharjo. Tahun 2022 perekonomian Sukoharjo mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen dan konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan sebesar 5,80 persen.
3. Peranan investasi dalam PDRB Pengeluaran Sukoharjo dapat didekati dari proporsi PMTB dalam PDRB. Proporsi PMTB pada tahun 2022 sebesar 22,76 persen, atau dapat dikatakan peranan investasi dalam perekonomian Sukoharjo sekitar 22,76 persen.
4. Nilai impor Sukoharjo lebih kecil dari nilai ekspornya, sehingga pada tahun 2022 terjadi surplus neraca perdagangan. Surplus perdagangan pada tahun 2022 mencapai 1.367,60 milyar rupiah.

https://sukoharjokab.bps.go.id

https://sukoharjokab.bps.go.id

LAMPIRAN

https://sukoharjokab.bps.go.id

https://sukoharjokab.bps.go.id

Lampiran I. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo 2018-2022
(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
I. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (I.a. s/d I.g)	**23.821.932,92**	**25.326.115,30**	**25.431.000,96**	**26,339,521.80**	**29,021,652.47**
I.a. Makanan,Minuman Selain Restoran	7.671.030,60	8.113.095,81	8.421.236,13	8,966,090.11	9,966,705.77
I.b. Pakaian dan Alas Kaki	804.044,62	870.619,51	908.418,65	925,371.00	976,870.11
I.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	3.013.900,89	3.216.291,46	3.288.790,37	3,343,551.26	3,467,248.37
I.d. Kesehatan dan Pendidikan	2.232.620,00	2.429.090,56	2.464.577,89	2,583,617.00	2,685,669.87
I.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	7.948.024,65	8.345.134,11	8.086.841,39	8,168,091.59	9,376,969.15
I.f. Hotel dan Restoran	1.711.690,59	1.879.358,27	1.755.160,32	1,830,785.18	1,983,472.66
I.g. Lainnya	440.621,57	472.525,58	505.976,21	522,015.66	564,716.54
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**386.200,22**	**438.092,91**	**435.379,49**	**457,817.74**	**523,320.56**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**1.947.113,82**	**2.063.575,28**	**1.971.593,93**	**1,974,505.82**	**2,027,175.77**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**8.357.936,34**	**9.130.166,83**	**8.684.869,91**	**9,224,987.18**	**9,744,968.86**
4.a. Bangunan	6.144.867,10	6.667.733,56	6.476.058,87	6,982,163.17	7,348,726.74
4.b. Non-Bangunan	2.213.069,24	2.462.433,27	2.208.811,04	2,242,824.01	2,396,242.12
5. Perubahan Inventori	**(514.200,68)**	**(279.764,02)**	**102.489,01**	**116,166.66**	**135,269.66**
6. Net Ekspor	***212.263,42***	***267.694,06***	***265.200,12***	***877.458,99***	***1.367,60***
PDRB	**34.211.246,04**	**36.945.880,36**	**36.890.533,42**	**38.990.458,19**	**42.819.987,27**

https://sukoharjokab.bps.go.id

** angka sementara*
*** angka sangat sementara*

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo 2018-2022

(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
I. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (I.a. s/d I.g)	**17.389.342,27**	**18.185.269,54**	**18.081.254,66**	**18,439,811.87**	**19,509,829.82**
I.a.Makanan,Minuman Selain Restoran	4.971.316,02	5.141.660,06	5.224.102,82	5,334,853.80	5,622,402.42
I.b. Pakaian dan Alas Kaki	666.148,35	708.981,69	715.291,63	718,224.33	737,185.45
I.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	2.240.563,36	2.321.896,81	2.345.115,78	2,354,621.52	2,379,580.51
I.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.691.428,26	1.790.884,24	1.886.800,42	1,917,366.59	1,958,781.71
I.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	6.237.748,01	6.530.989,03	6.307.906,24	6,504,712.91	7,137,621.48
I.f. Hotel dan Restoran	1.240.327,48	1.330.623,32	1.239.608,68	1,245,682.76	1,300,617.37
I.g. Lainnya	341.810,79	360.234,39	362.429,09	364,349.96	373,640.88
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**254.798,42**	**283.290,83**	**276.966,26**	**284,305.87**	**303,297.50**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**1.230.173,65**	**1.292.642,49**	**1.239.644,14**	**1,208,492.54**	**1,225,411.44**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**5.918.915,73**	**6.234.521,55**	**5.926.416,33**	**6,246,535.39**	**6,371,021.43**
4.a. Bangunan	4.502.871,34	4.742.435,58	4.570.244,28	4,847,080.18	4,919,786.38
4.b. Non-Bangunan	1.416.044,39	1.492.085,97	1.356.172,05	1,399,455.21	1,451,235.05
5. Perubahan Inventori	**-171.830,75**	**-70.762,28**	**53.665,33**	**32,882.40**	**38,121.31**
6. Net Ekspor	***942.665,77***	***1.151.480,50***	***1.038.556,39***	***1.422.089,46***	***1.737.677,68***
PDRB	**25.564.065,09**	**27.076.442,63**	**26.616.503,11**	**27.634.117,53**	**29.185.359,18**

https://sukoharjokab.bps.go.id

** angka sementara*
*** angka sangat sementara*

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo 2018-2022
(Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
I. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (I.a. s/d I.g)	69,63	68,55	68,94	67.55	67.78
I.a. Makanan,Minuman Selain Restoran	22,42	21,96	22,83	23.00	23.28
I.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,35	2,36	2,46	2.37	2.28
I.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	8,81	8,71	8,91	8.58	8.10
I.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,53	6,57	6,68	6.63	6.27
I.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	23,23	22,59	21,92	20.95	21.90
I.f. Hotel dan Restoran	5,00	5,09	4,76	4.70	4.63
I.g. Lainnya	1,29	1,28	1,37	1.34	1.32
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,13	1,19	1,18	1.17	1.22
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,69	5,59	5,34	5.06	4.73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,43	24,71	23,54	23.66	22.76
4.a. Bangunan	17,96	18,05	17,55	17.91	17.16
4.b. Non-Bangunan	6,47	6,66	5,99	5.75	5.60
5. Perubahan Inventori	-1,50	-0,76	0,28	0.30	0.32
6. Net Ekspor	0,62	0,72	0,72	2,25	3,19
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

https://sukoharjokab.bps.go.id

** angka sementara*
*** angka sangat sementara*

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo 2018-2022

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
I. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (I.a. s/d I.g)	5,30	4,58	(0,57)	1,98	5,80
I.a. Makanan,Minuman Selain Restoran	3,24	3,43	1,60	2,12	5,39
I.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,42	6,43	0,89	0,41	2,64
I.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	4,38	3,63	1,00	0,41	1,06
I.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,74	5,88	5,36	1,62	2,16
I.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	6,85	4,70	(3,42)	3,12	9,73
I.f. Hotel dan Restoran	7,17	7,28	(6,84)	0,49	4,41
I.g. Lainnya	5,01	5,39	0,61	0,53	2,55
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,79	11,18	(2,23)	2,65	6,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,77	5,08	(4,10)	-2,51	1,40
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,74	5,33	(4,94)	5,40	1,99
4.a. Bangunan	5,69	5,32	(3,63)	6,06	1,50
4.b. Non-Bangunan	5,88	5,37	(9,11)	3,19	3,70
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	**5,79**	**5,92**	**(1,70)**	**3,82**	**5,61**

https://sukoharjokab.bps.go.id

** angka sementara*
*** angka sangat sementara*

Lampiran 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo 2018-2022

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (I.a. s/d I.g)	136,99	139,27	140,65	142,84	148,75
I.a. Makanan,Minuman Selain Restoran	154,31	157,79	161,20	168,07	177,27
I.b. Pakaian dan Alas Kaki	120,70	122,80	127,00	128,84	132,51
I.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	134,52	138,52	140,24	142,00	145,71
I.d. Kesehatan dan Pendidikan	132,00	135,64	130,62	134,75	137,11
I.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	127,42	127,78	128,20	125,57	131,37
I.f. Hotel dan Restoran	138,00	141,24	141,59	146,97	152,50
I.g. Lainnya	128,91	131,17	139,61	143,27	151,14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	151,57	154,64	157,20	161,03	172,54
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	158,28	159,64	159,05	163,39	165,43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	141,21	146,45	146,55	147,68	152,96
4.a. Bangunan	136,47	140,60	141,70	144,05	149,37
4.b. Non-Bangunan	156,29	165,03	162,87	160,26	165,12
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	**133,83**	**136,45**	**138,60**	**141,10**	**146,72**

https://sukoharjokab.bps.go.id

** angka sementara*

*** angka sangat sementara*

Lampiran 6. Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (2010=100) Kabupaten Sukoharjo 2018-2022
(Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (I.a. s/d I.g)	2,07	1,66	0,99	1,56	4,14
I.a. Makanan,Minuman Selain Restoran	3,91	2,26	2,16	4,26	5,47
I.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,39	1,74	3,42	1,45	2,85
I.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	1,75	2,98	1,24	1,25	2,61
I.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,70	2,76	(3,70)	3,16	1,75
I.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	0,25	0,28	0,33	(2,05)	4,62
I.f. Hotel dan Restoran	2,38	2,34	0,25	3,80	3,76
I.g. Lainnya	2,82	1,76	6,43	2,63	5,49
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,67	2,03	1,65	2,44	7,15
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,67	0,86	(0,37)	2,73	1,25
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,82	3,71	0,07	0,78	3,57
4.a. Bangunan	4,28	3,03	0,78	1,66	3,69
4.b. Non-Bangunan	6,36	5,60	(1,31)	(1,60)	3,03
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	2,26	1,96	1,58	1,80	3,98

https://sukoharjokab.bps.go.id

** angka sementara*
*** angka sangat sementara*

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Sistem Neraca Nasional 2008, Jakarta, 2013.*
2. _____,*Pedoman Penyusunan PDRB Kabupaten/Kota Tahun Dasar 2010 Menurut Pengeluaran, Jakarta, 2014.*
3. _____,*Booklet Perubahan Tahun Dasar PDB Berbasis SNA 2008, Jakarta, 2014.*
4. _____,*Produk Domestik Bruto menurut Pengeluaran 2014-2018 , Semarang, 2019*
5. _____,*Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Tengah, berbagai seri*, Semarang.
6. _____,*Sukoharjo dalam Angka, berbagai seri*, Sukoharjo.
7. _____,*Statistik Air Bersih Jawa Tengah, berbagai seri*, Semarang.
8. _____,*Statistik Impor Jawa Tengah, berbagai seri*, Semarang.
9. _____,*Statistik Industri Manufaktur Besar Sedang Jawa Tengah, berbagai seri*, Semarang.
10. _____,*Statistik Ekspor Jawa Tengah, berbagai seri*, Semarang.

https://sukoharjokab.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://sukoharjokab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SUKOHARJO
Jl. Bulakrejo Gentan No.3, Bendosari 57527
sukoharjokab.bps.go.id; Email: bps3311@bps.go.id